BUKU I

# PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025

# TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BIMA

2025

BUKU I

PEMERINTAH KOTA BIMA

# PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

# NOMOR 1 TAHUN 2025

# TENTANG

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

# TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4418);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 20232 Nomor 253);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 254);
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024

Nomor 256);

28. Peraturan Walikota Bima Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 809);
29. Peraturan WaliKota Bima Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Bima Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 894);
30. Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| a. | pendapatan daerah | Rp 899.569.714.005,82 |
| b. | belanja daerah dan transfer | Rp 893.324.937.238,00 |
| | surplus | Rp 6.244.776.767,82 |
| c. | pembiayaan daerah | |
| | - penerimaan daerah | Rp 17.799.857.573,12 |
| | - pengeluaran daerah | Rp 0,00 |

pembiayaan netto Rp 17.799.857.573,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 24.044.634.340,94

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp11.852.920.698,18) dengan rincian sebagai berikut :
   a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 911.422.634.704,00
   b. realisasi Rp 899.569.714.005,82
   Selisih Kurang Rp 11.852.920.698,18

2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp34.897.555.040,00) dengan rincian sebagai berikut :
   a. anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 928.222.492.278,00
   b. realisasi Rp 893.324.937.238,00
   Selisih kurang Rp 34.897.555.040,00

3) Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,88 dengan rincian sebagai berikut :
   a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp 17.799.857.574,00
   b. realisasi Rp 17.799.857.573,12
   Selisih lebih Rp 0,88

4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp1.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
   a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
   b. realisasi Rp 0,00
   Selisih lebih (kurang) Rp 1.000.000.000,00

5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp999.999.999,12) dengan rincian sebagai berikut :
   a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 16.799.857.574,00
   b. realisasi Rp 17.799.857.573,12
   Selisih lebih Rp 999.999.999,12

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal | | Rp 17.799.857.573,12 |
| b. | penggunaan SAL sebagai Penerimaan pembiayaan Tahun Berjalan | | Rp 17.799.857.573,12 |
| c. | sub total (a-b) | Rp | 0,00 |
| d. | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | Rp 24.044.634.340,94 |
| e. | sub total (c+d) | Rp | 24.044.634.340,94 |
| f. | koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | | Rp 0,00 |
| g. | saldo anggaran lebih akhir (e+f) | | Rp 24.044.634.340,94 |

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 6 Agustus 2025

WALI KOTA BIMA,

A. RAHMAN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2025 NOMOR 210
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
( 05 /2025)



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN I :

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA BIMA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2025

(DALAM RUPIAH)

| URAIAN | KODE AKUN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % | KENAIKAN/ PENURUNAN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | 5.1.1.1 | | | | |
| Pajak Daerah | 5.1.1.1.1 | 25.780.050.685,00 | 13.181.183.980,13 | 30,54 | 13.231.895.985,13 |
| Retribusi Daerah | 5.1.1.1.2 | 24.410.958.339,00 | 21.178.365.486,40 | 103,91 | 8.232.592.592,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.3 | 1.456.772.700,00 | 2.222.635.353,00 | 152,50 | 2.184.780.454,00 |
| Lain - lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.4 | 80.160.430.663,00 | 5.982.109.151,01 | 7,11 | 17.372.99.6.611,87 |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **152.954.212.487,00** | **57.955.992.781,62** | **40,20** | **51.685.182.985,70** |
| | | | | | |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | 5.1.1.2 | | | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 5.1.1.2.1 | 395.426.326.026,00 | 384.388.330.312,00 | 98,44 | 468.167.760.010,00 |
| Dana Perimbangan | 5.1.1.2.1.1 | 356.520.182.000,00 | 349.394.384.312,00 | 99,12 | 410.975.356.010,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 5.1.1.2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.171.210.000,00 |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 5.1.1.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Keistimewaan | 5.1.1.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 5.1.1.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insentif Fiskal | 5.1.1.2.1.6 | 5.187.856.000,00 | 2.764.630.000,00 | 50,09 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 5.1.1.2.2 | 82.187.982.663,00 | 99.869.637.238,00 | 95,48 | 58.055.905.238,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil | 5.1.1.2.2.1 | 82.187.982.663,00 | 59.405.637.238,00 | 95,48 | 34.202.905.238,00 |
| Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.853.000.000,00 |
| | | | | | |
| **Jumlah Pendapatan Transfer** | | **708.119.980.289,00** | **757.768.927.866,00** | **86,64** | **752.553.663.867,00** |
| | | | | | |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | 5.1.1.3 | | | | |
| Pendapatan Hibah | 5.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perata can Perundang-Undangan | 5.1.1.3.3 | 11.234.039.974,00 | 84.762.399.075,00 | 753,12 | 3.421.776.903,00 |
| **Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah** | | **11.234.039.974,00** | **84.762.399.075,00** | **753,12** | **3.521.776.903,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **BELANJA OPERASI** | 5.2.1.1 | | | | |
| Belanja Pegawai | 5.2.1.1.1 | 961.140.454.211,00 | 414.864.949.065,00 | 99,69 | 414.875.725.636,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.2.1.1.2 | 264.430.823.081,00 | 379.668.339.751,00 | 94,44 | 347.852.513.668,75 |
| Belanja Bunga | 5.2.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 5.2.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 5.2.1.1.5 | 46.363.134.351,00 | 43.880.349.214,00 | 95,11 | 35.168.351.113,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.2.1.1.6 | 5.777.880.000,00 | 4.114.469.306,00 | 60,24 | 5.401.306.000,00 |
| **Jumlah Belanja Operasi** | | **991.510.930.968,00** | **774.525.836.336,00** | **87,17** | **803.574.756.823,75** |
| | | | | | |
| **BELANJA MODAL** | 5.2.2.1 | | | | |
| Belanja Modal Tanah | 5.2.2.1.1 | 3.845.384.884,00 | 2.161.760.436,00 | 77,82 | 3.896.381.000,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.2.2.1.2 | 38.960.786.743,00 | 33.333.717.335,00 | 93,45 | 26.506.618.479,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.2.2.1.3 | 68.630.675.275,00 | 47.599.701.041,00 | 93,17 | 49.102.980.683,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.2.2.1.4 | 51.871.757.679,00 | 47.137.357.300,00 | 70,06 | 59.999.91 1.000,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 5.2.2.1.5 | 249.330.180,00 | 140.690.109,00 | 95,63 | 1.757.038.736,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 5.2.2.1.6 | 1.047.450.000,00 | 2.022.504.000,00 | 96,25 | 70.000.000,00 |
| **Jumlah Belanja Modal** | | **116.856.384.881,00** | **113.468.660.589,00** | **96,80** | **187.870.520.128,00** |
| | | | | | |
| **BELANJA TAK TERDUGA** | 5.2.2.5 | | | | |
| Belanja Tidak Terduga | 5.2.2.5.1 | 1.040.950.977,00 | 1.380.699.700,00 | 42,24 | 1.867.744.077,00 |
| **Jumlah Belanja Tidak Terduga** | | **1.040.950.977,00** | **1.380.699.700,00** | **42,24** | **1.867.744.077,00** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Belanja Bagi Hasil | 5.2.3.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 5.2.3.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| URAIAN | KODE AKUN | ANGGARAN 2024 | REALISASI 2024 | % | REALISASI TH 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | 6.1.0.1 | | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 6.1.0.1.1 | 17.799.857.574,60 | 17.799.857.575,12 | 100,00 | 79.583.036.019,67 |
| Pencairan Dana Cadangan | 6.1.0.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.1.0.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 6.1.0.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 6.1.0.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.204.98 0,00 |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 6.1.0.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | | **17.799.857.574,60** | **17.799.857.575,12** | **100,00** | **36.502.231.582,67** |
| | | | | | |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | 6.1.0.2 | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 6.1.0.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 6.1.0.2.2 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 6.1.0.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 6.1.0.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 6.1.0.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000.000,00** |
| | | | | | |
| **PEMBIAYAAN NETO** | | **16.799.857.574,60** | **17.799.857.575,12** | **105,95** | **34.502.231.582,67** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.799.857.575,12** |

Catatan atau Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

MALIOSTO BIMA,

A. HAMMIN

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAMPIRAN I.1 :

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

[illegible]

KOTA BIRU

[illegible]

| [illegible] | | | | [illegible] | | [illegible] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.02 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | 1.03.1.01.1.00.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | 1.03.1.01.1.00.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | 1.03.1.01.1.00.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | 1.03.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.03 | 1.03.1.01.1.00.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.04 | 1.04.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.04 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.05 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.05 | 1.05.1.01.1.00.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.05 | 1.05.1.01.1.00.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.05 | 1.05.1.01.1.00.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.05 | 1.05.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.06 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.07 | 1.07.1.01.1.00.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.07 | 1.07.1.01.1.00.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.07 | 1.07.1.01.1.00.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.07 | 1.07.1.01.1.00.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | 1.11.1.01.1.11.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | 1.11.1.01.1.11.01.0000 | 0 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | 1.11.1.01.1.11.01.0000 | 0.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | 1.11.1.01.1.11.01.0000 | 0.1.03 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.11 | 1.11.1.01.1.11.01.0000 | 0.1.04 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.12 | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.21 | 1.21.1.01.1.00.01.0000 | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |







| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

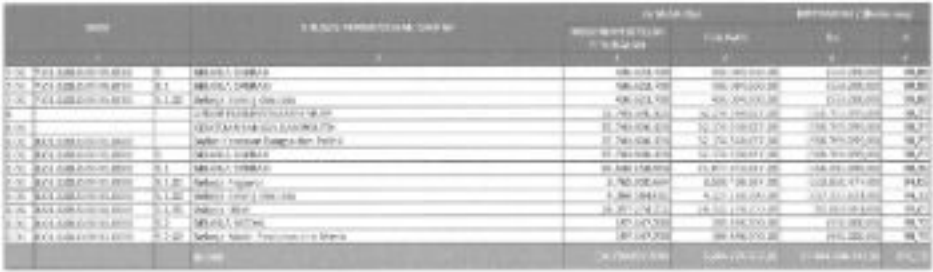


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





PEMERINTAH KOTA BIMA

LAMPIRAN I.2 :

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

[illegible] : PEMUTUSAN GAGDAN KOTA AMA
[illegible] : 1 [illegible] 2024
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KOTA AMA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TAHUN ANGGARAN 2024
(Disajikan Untuk Periode 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024)

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| [illegible] | | | | | |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible]





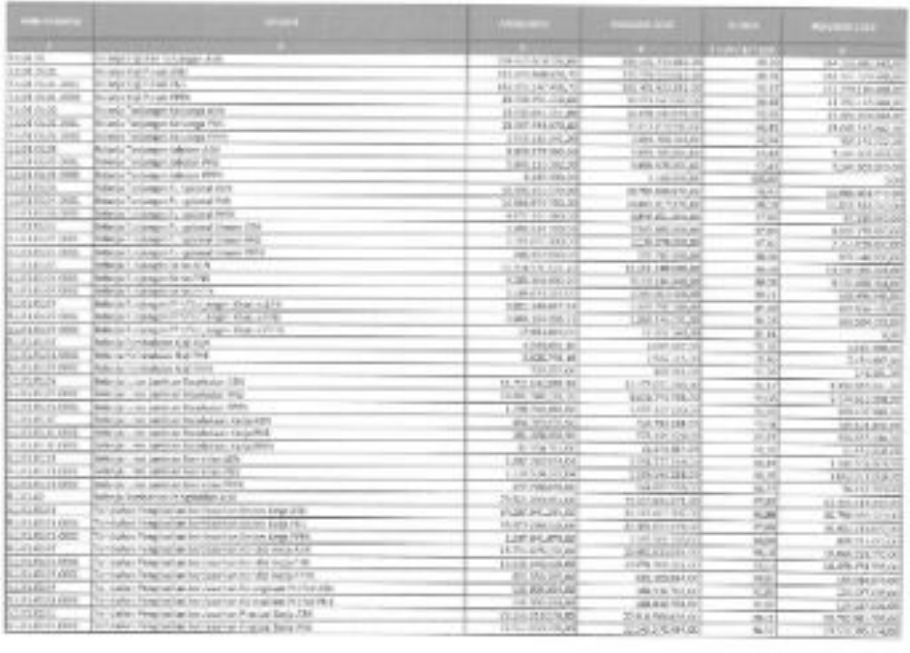


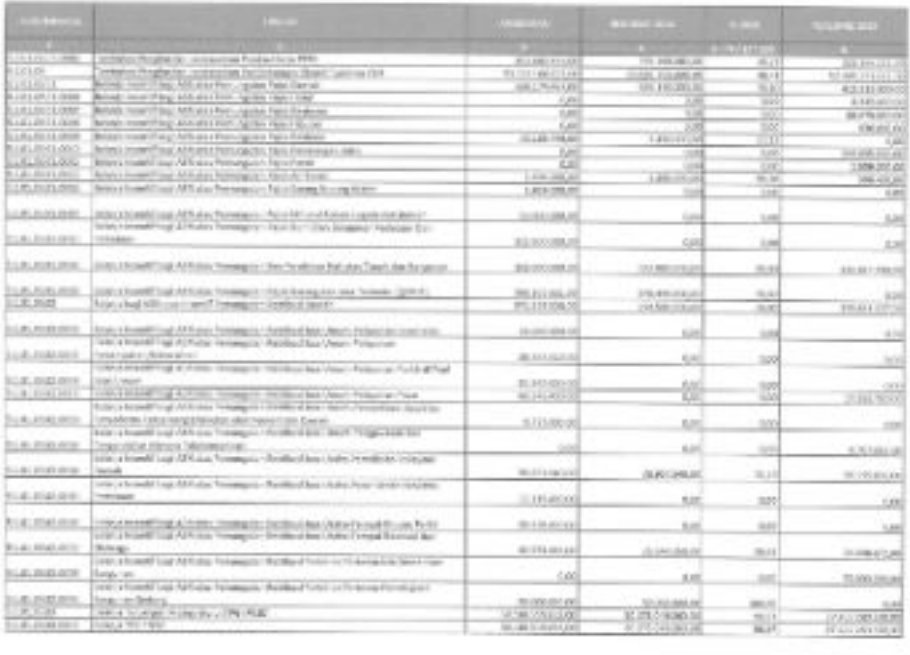


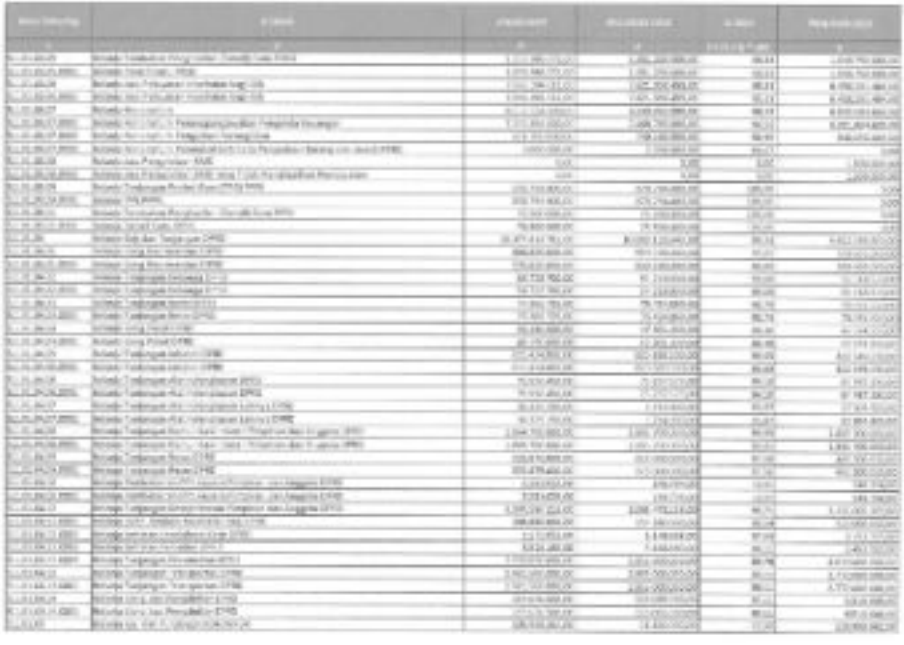


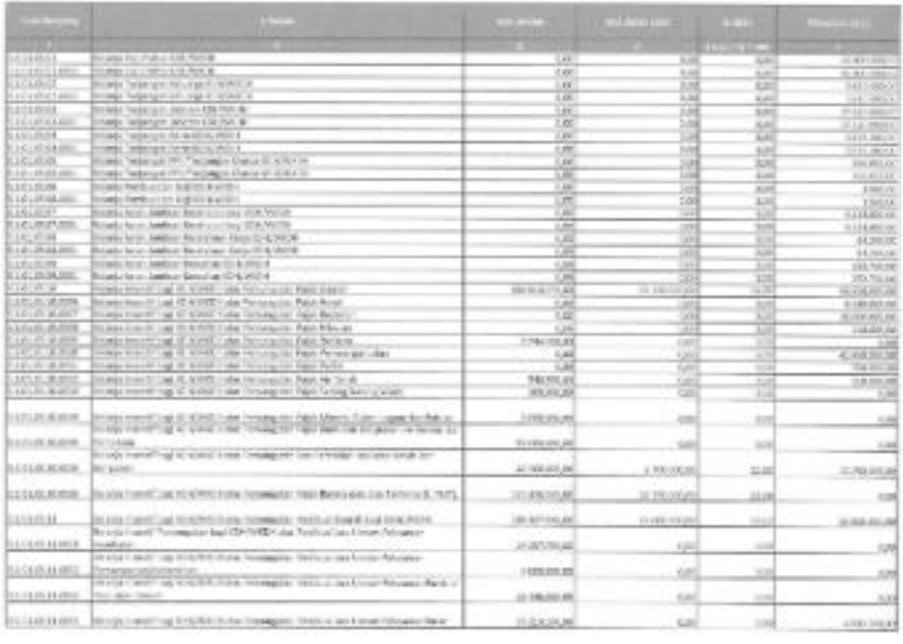


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |















| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |















| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





PEMERINTAH KOTA BIMA

LAMPIRAN I.3 :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



| KODE REKENING | | | | URAIAN | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | SISA/(LEBIH) REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Rupiah | (%) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KESEHATAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |









PEMERINTAH KOTA BIMA

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

[illegible]

**PEMERINTAH KOTA BIMA**

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

| [illegible] | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Unit Kerja : SEKOLAH PEMBERITA NASIONAL
Tahun Anggaran : 2022

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | JUMLAH (Rp.) | | PERUBAHAN (BERTAMBAH / (BERKURANGI)) | | JUMLAH SETELAH PERUBAHAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | PERUBAHAN | (Rp) | (%) | |
| | 1.01.1.06.01.01.0001 | | | 01 | | | | | | |
| | 1.01.1.06.01.01.0002 | | | 02 | | | | | | |
| | 1.01.1.06.01.01.0003 | | | 03 | | | | | | |
| 1.02 | 1.02.1.06.01.01.0001 | | | 01 | | | | | | |
| 1.03 | 1.03.1.06.01.01.0001 | 1.03.1.3 | | | | | | | | |
| 1.04 | 1.04.1.06.01.01.0001 | 1.04.1.3.01 | | | | | | | | |
| 1.05 | 1.05.1.06.01.01.0001 | 1.05.1.3.01.0001 | | | | | | | | |
| 1.06 | 1.06.1.06.01.01.0001 | 1.06.1.3.01.0001 | 1.1 | | | | | | | |
| 1.07 | 1.07.1.06.01.01.0001 | 1.07.1.3.01.0001 | 1.1.1 | | | | | | | |
| 1.08 | 1.08.1.06.01.01.0001 | 1.08.1.3.01.0001 | 1.1.2.3 | | | | | | | |
| 1.09 | 1.09.1.06.01.01.0001 | 1.09.1.3.01.0001 | 1.1.3 | | | | | | | |
| 1.10 | 1.10.1.06.01.01.0001 | 1.10.1.3.01.0001 | 1.1.3.1 | | | | | | | |
| 1.11 | 1.11.1.06.01.01.0001 | 1.11.1.3.01 | | | | | | | | |
| 1.12 | 1.12.1.06.01.01.0001 | 1.12.1.3.01.0001 | 1.1.3.2 | | | | | | | |
| 1.13 | 1.13.1.06.01.01.0001 | 1.13.1.3.01.0001 | 1.1.3.3 | | | | | | | |
| 1.14 | 1.14.1.06.01.01.0001 | 1.14.1.3.01.0001 | 1.1.3.4 | | | | | | | |
| 1.15 | 1.15.1.06.01.01.0001 | 1.15.1.3.01.0001 | 1.1.3.5 | | | | | | | |
| 1.16 | 1.16.1.06.01.01.0001 | 1.16.1.3.01 | | | | | | | | |
| 1.17 | 1.17.1.06.01.01.0001 | 1.17.1.3.01.0001 | 1.1.3.6 | | | | | | | |
| 1.18 | 1.18.1.06.01.01.0001 | 1.18.1.3.01.0001 | 1.1.3.7 | | | | | | | |
| 1.19 | 1.19.1.06.01.01.0001 | 1.19.1.3.01.0001 | 1.1.3.8 | | | | | | | |
| 1.20 | 1.20.1.06.01.01.0001 | 1.20.1.3.01.0001 | 1.1.3.9 | | | | | | | |
| 1.21 | 1.21.1.06.01.01.0001 | 1.21.1.3.01.0001 | 1.1.3.10 | | | | | | | |
| 1.22 | 1.22.1.06.01.01.0001 | 1.22.1.3.01.0001 | 1.1.3.11 | | | | | | | |
| 1.23 | 1.23.1.06.01.01.0001 | 1.23.1.3.01.0001 | 1.1.3.12 | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

[illegible]

| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | [illegible] | [illegible] | (Rp) | (%) | |
| [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS SOSIAL



Unit Kerja : [illegible]
Alamat Unit Kerja : [illegible]
Tahun Anggaran : [illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |









PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS TENAGA KERJA



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |





PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KETAHANAN PANGAN



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tahun Anggaran 2022

Satuan Kerja : [illegible]
Unit Organisasi : [illegible]
Program/Kegiatan : [illegible]

| Kode RO/Komponen | Uraian | Anggaran (Rp) | | Realisasi s.d. Bulan Ini | | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sebelum Revisi | Sesudah Revisi | (Rp) | (%) | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

| | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

**[illegible]**

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | | | | [illegible] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PERHUBUNGAN



Kementerian / Lembaga : [illegible]
Bidang Urusan : [illegible]
Organisasi : [illegible]

| [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KOMUNIKASI ,
# INFORMATIKA DAN STATISTIK



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# DINAS PERTANIAN



Urusan Pemerintahan : -
Bidang Urusan : -
Organisasi : Dinas Perhubungan

| | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# SEKRETARIAT DAERAH



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |











| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# SEKRETARIAT DPRD



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |











PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH









| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



[redacted]

[redacted]

| [redacted] | | | | [redacted] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | [redacted] | | | |
| [redacted] | | | | [redacted] | | | |
| [redacted] | | | | [redacted] | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | [illegible] (Rp) | | [illegible] (Rp) | (%) | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |





PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

LAMPIRAN I
NOMOR
TANGGAL

**PEMERINTAH KOTA BIMA**

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan
Organisasi

| KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN | (Rp) | (%) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# INSPEKTORAT



| | | |









| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# KECAMATAN
# RASANAE BARAT

LAMPIRAN V : PENETAPAN SALDO KOTA BIMA
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

PEMERINTAH KOTA BIMA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# KECAMATAN
# RASANAE TIMUR





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# KECAMATAN ASAKOTA

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PARE
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020



**PERATURAN DAERAH**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARE NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Urusan : 1.02 Pendidikan
Program : 1.02.01 Pendidikan Anak Usia Dini

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (RP) | | PERUBAHAN (BERTAMBAH/BERKURANG) | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERUBAHAN KEDUA APBD PERUBAHAN | SEBELUMNYA | (Rp) | (%) | |
| 1.02.01.2.01.0001 | Gedung Sekolah | 12.000.000.000 | 12.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0002 | Pembangunan Gedung Sekolah Baru Lengkap Beserta Perabotnya | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Guru dan Tata Usaha | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0005 | Pembangunan Ruang Perpustakaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0006 | Pembangunan Ruang Laboratorium | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0007 | Pembangunan Ruang Ibadah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0008 | Pembangunan Ruang UKS | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0009 | Pembangunan Ruang Toilet | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0010 | Pembangunan Pagar Sekolah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0011 | Pembangunan Gerbang Sekolah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0012 | Pengadaan Mebelair | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0013 | Pengadaan Peralatan Pendidikan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0014 | Pengadaan Alat Peraga Edukatif | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0015 | Pengadaan Buku Perpustakaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0016 | Pengadaan Alat Olahraga | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0017 | Pengadaan Alat Kesenian | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0018 | Pengadaan Alat Kebersihan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0019 | Pengadaan Alat Komputer | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0020 | Pengadaan Alat Komunikasi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0021 | Pengadaan Alat Transportasi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0022 | Pengadaan Alat Kesehatan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0023 | Pengadaan Alat Keamanan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0024 | Pengadaan Alat Pertanian | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0025 | Pengadaan Alat Peternakan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0026 | Pengadaan Alat Perikanan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0027 | Pengadaan Alat Kehutanan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0028 | Pengadaan Alat Pertambangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0029 | Pengadaan Alat Perindustrian | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0030 | Pengadaan Alat Perdagangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0031 | Pengadaan Alat Pariwisata | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0032 | Pengadaan Alat Kebudayaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0033 | Pengadaan Alat Kepemudaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0034 | Pengadaan Alat Keolahragaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0035 | Pengadaan Alat Perpustakaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0036 | Pengadaan Alat Kearsipan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0037 | Pengadaan Alat Dokumentasi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0038 | Pengadaan Alat Statistik | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0039 | Pengadaan Alat Pemetaan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0040 | Pengadaan Alat Geodesi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0041 | Pengadaan Alat Geofisika | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0042 | Pengadaan Alat Meteorologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0043 | Pengadaan Alat Klimatologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0044 | Pengadaan Alat Hidrologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0045 | Pengadaan Alat Oseanografi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0046 | Pengadaan Alat Geologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0047 | Pengadaan Alat Mineralogi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0048 | Pengadaan Alat Petrologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0049 | Pengadaan Alat Paleontologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0050 | Pengadaan Alat Stratigrafi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0051 | Pengadaan Alat Sedimentologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0052 | Pengadaan Alat Geomorfologi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0053 | Pengadaan Alat Geologi Struktur | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0054 | Pengadaan Alat Geologi Lingkungan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0055 | Pengadaan Alat Geologi Kelautan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0056 | Pengadaan Alat Geologi Pertambangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0057 | Pengadaan Alat Geologi Perminyakan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0058 | Pengadaan Alat Geologi Panas Bumi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0059 | Pengadaan Alat Geologi Air Tanah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0060 | Pengadaan Alat Geologi Bencana | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0061 | Pengadaan Alat Geologi Lingkungan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0062 | Pengadaan Alat Geologi Kelautan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0063 | Pengadaan Alat Geologi Pertambangan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0064 | Pengadaan Alat Geologi Perminyakan | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0065 | Pengadaan Alat Geologi Panas Bumi | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0066 | Pengadaan Alat Geologi Air Tanah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |
| 1.02.01.2.01.0067 | Pengadaan Alat Geologi Bencana | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0,00 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# KECAMATAN MPUNDA



| | | |

| | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

# KECAMATAN RABA



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PEMERINTAH KOTA BIMA

# BADAN KESATUAN BANGSA
# DAN POLITIK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAMPIRAN I.4 :

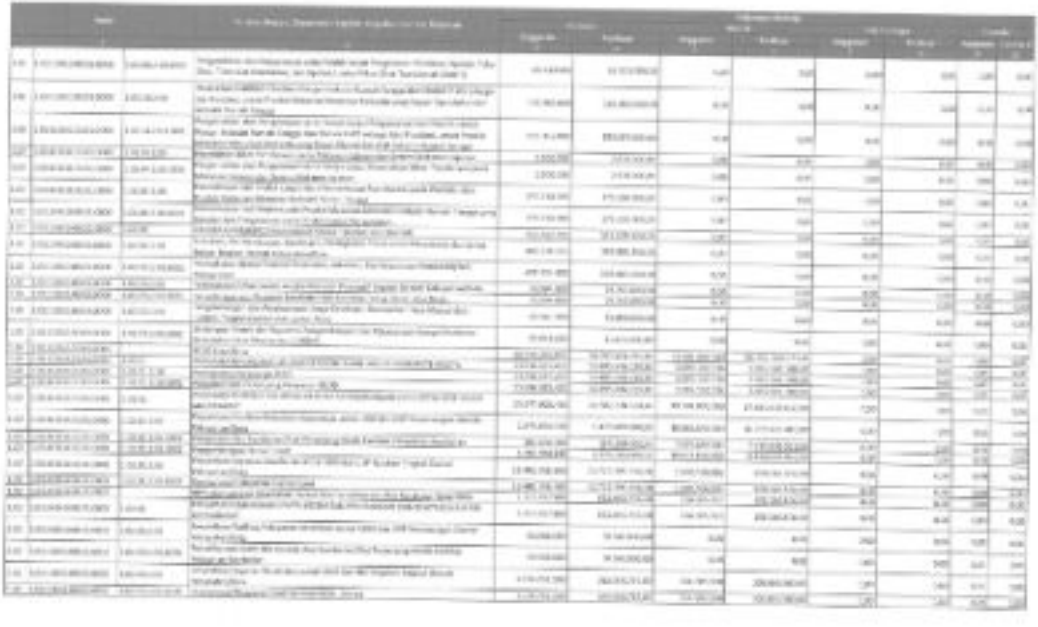
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |































| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |





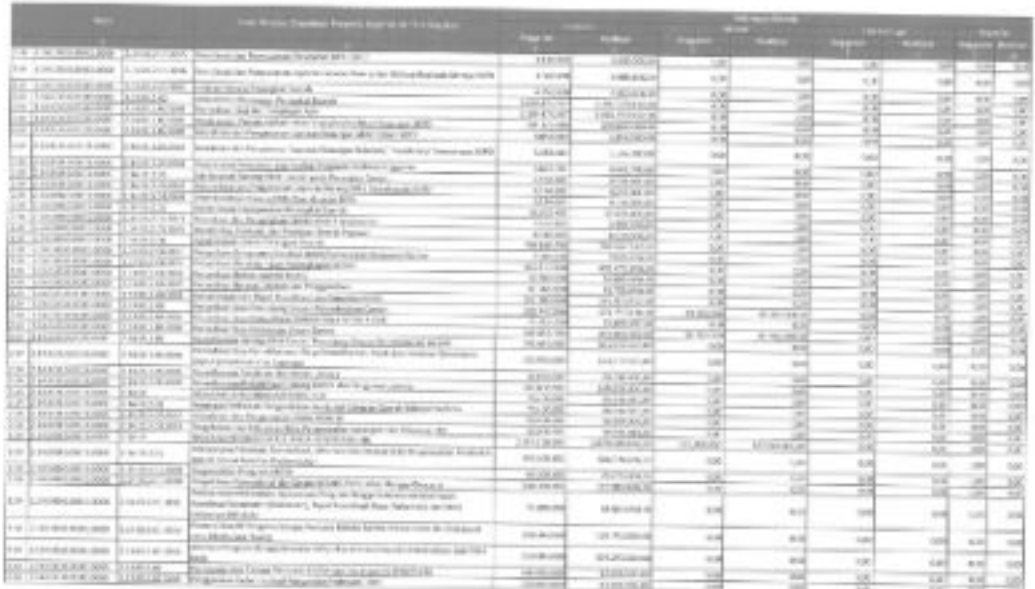
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

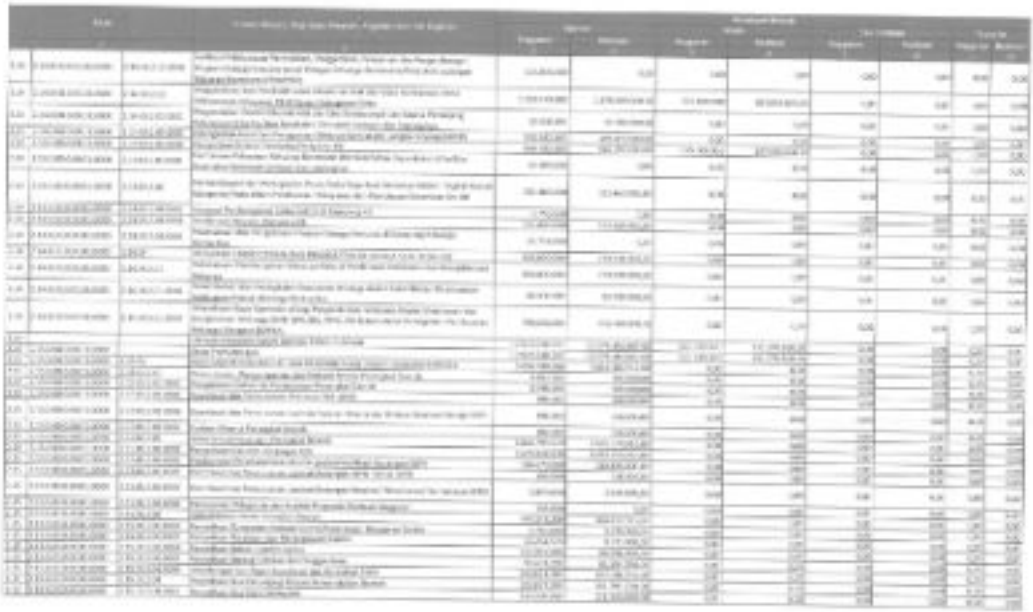




















| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |







| | | |















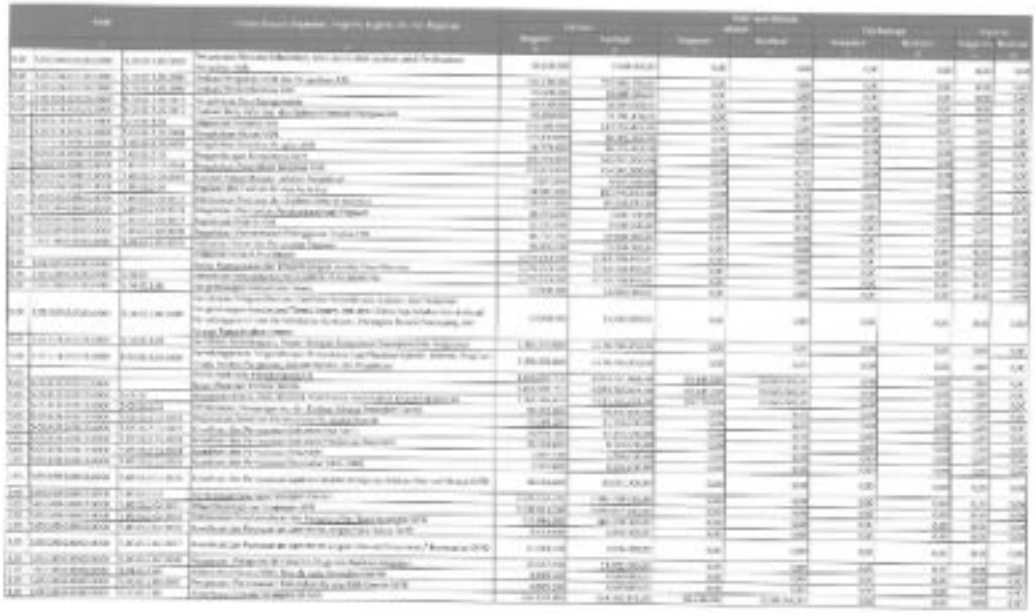








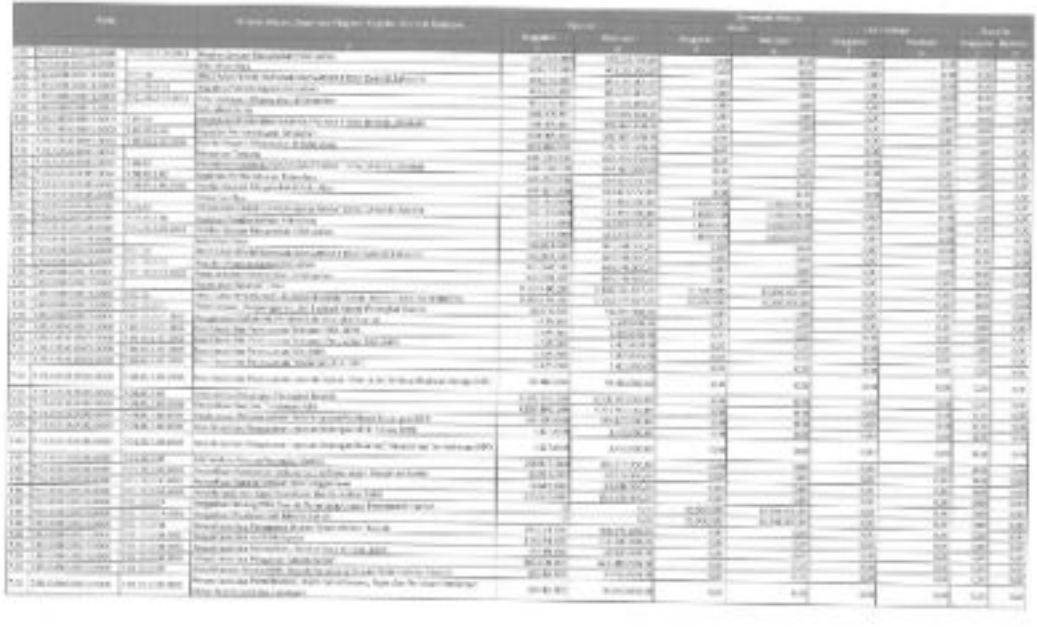






























# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN II :

## LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

**PEMERINTAH KOTA BIMA**
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(DALAM RUPIAH)*

| URAIAN | REFF CALK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 5.2.1 | 17.799.857.573,12 | 76.583.026.629,67 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 5.2.2 | 17.799.857.573,12 | 76.583.026.629,67 |
| Subtotal | | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | 5.2.3 | 24.044.634.340,94 | 17.799.857.573,12 |
| Subtotal | | 24.044.634.340,94 | 17.799.857.573,12 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 5.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| Lain - Lain | | | |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 5.2.5 | 24.044.634.340,94 | 17.799.857.573,12 |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

WALIKOTA BIMA,

A. RAHMAN



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN III :

## LAPORAN OPERASIONAL

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH [NAMA DAERAH]
NOMOR [NOMOR] TAHUN [TAHUN]
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD/PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN [TAHUN]

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

| URAIAN | REF. LRA | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| PENDAPATAN | 5.4.1 | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.4.1.1 | | | | |
| Pajak Daerah | 5.4.1.1.1 | 25.380.891.064,00 | 20.311.111.280,00 | 106.702.809,00 | 2,11 |
| Retribusi Daerah | 5.4.1.1.2 | 29.205.904.585,40 | 9.091.522.636,68 | 38.113.445.752,80 | 130,41 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.4.1.1.3 | 53.170.883,00 | 3.716.170.772,00 | (3.663.7 [illegible] | -98,57 |
| Lain - lain PAD yang Sah | 5.4.1.1.4 | 20.313.779.236,71 | 23.863.247.335,58 | (3.[illegible] | -[illegible] |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | | **77.330.762.377,11** | **68.245.051.445,64** | **9.077.698.931,47** | **13,30** |
| PENDAPATAN TRANSFER | 5.4.1.2 | | | | |
| **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **5.4.1.2.2** | **652.678.065.312,00** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| Dana Perimbangan | 5.4.1.2.2.1 | 619.[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 5.4.1.2.2.2 | 0,00 | 31.[illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 5.4.1.2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Keistimewaan | 5.4.1.2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 5.4.1.2.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insentif Fiskal | 5.4.1.2.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | 5.4.1.2.3 | 2.[illegible] | 0,00 | [illegible] | [illegible] |
| Pendapatan Bagi Hasil | **5.4.1.2.3** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| Bantuan Keuangan | 5.4.1.2.3.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **Jumlah Pendapatan Transfer** | 5.4.1.2.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 5.4.1.3 | | | | |
| Pendapatan Hibah | 5.4.1.3.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Pendapatan Dana Darurat | 5.4.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan | 5.4.1.3.3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| **[illegible]** | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| BEBAN | 5.4.2 | | | | |
| **BEBAN OPERASI** | 5.4.2.1 | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| Beban Pegawai | 5.4.2.1.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Beban Barang dan Jasa | 5.4.2.1.2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Beban Bunga | 5.4.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 5.4.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 5.4.2.1.5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Beban Bantuan Sosial | 5.4.2.1.6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.4.2.1.7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 5.4.2.1.8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **BEBAN TRANSFER** | **5.4.2.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Beban Bagi Hasil | 5.4.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Keuangan | 5.4.2.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **[illegible]** | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| **SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL** | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| **SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL** | 5.4.3 | | | | |
| **SURPLUS NON-OPERASIONAL** | 5.4.3.1 | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| Surplus Penjualan/Pemutusan/Pelepasan Aset Non Lancar | 5.4.3.1.1 | 0,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 5.4.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 5.4.3.1.3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **DEFISIT NON-OPERASIONAL** | 5.4.3.2 | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |
| Defisit Penjualan/Pemutusan/Pelepasan Aset Non Lancar | 5.4.3.2.1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 5.4.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 5.4.3.2.3 | 0,00 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| **JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL** | | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** | **[illegible]** |

| URAIAN | REF LRA | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| SURPLUS/[DEFISIT] SEBELUM POS LUAR BIASA | | [75.395.742.110,07] | 91.393.703.552,64 | [167.189.465.491,71] | [183,37] |
| POS LUAR BIASA | 5.8.4 | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | 5.8.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Luar Biasa | 5.8.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POS LUAR BIASA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALIKOTA BIMA,

A. RAHMAN



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN IV :

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

| URAIAN | REFF CALK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ekuitas Awal | 5.6.1 | 2.238.552.088.913,85 | 2.100.403.506.926,58 |
| Surplus/(Defisit) LO | 5.6.2 | (75.595.742.119,07) | 91.553.721.532,64 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 5.6.3 | 913.339.276,75 | 26.537.869.826,63 |
| Koreksi Ekuitas - Aset Lancar | 5.6.3.1 | 721.750.118,25 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang | 5.6.3.2 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Aset Tetap | 5.6.3.3 | 690.468.219,50 | 2.099.407.000,00 |
| Koreksi Ekuitas - Properti Investasi | 5.6.3.4 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Dana Cadangan | 5.6.3.5 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya | 5.6.3.6 | (402.049.000,00) | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek | 5.6.3.7 | (96.830.061,00) | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Panjang | 5.6.3.8 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Ekuitas - Lainnya | 5.6.3.9 | 0,00 | 24.438.462.874,63 |
| Ekuitas Akhir | | 2.163.005.035.471,53 | 2.238.552.098.913,85 |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

WALIKOTA BIMA,

A. RAHMAN



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN V :

## N E R A C A

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA BIMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)

| URAIAN | KODE REK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ASET | 5.1.1 | | |
| ASET LANCAR | 5.1.1.1 | | |
| Kas dan Setara Kas | 5.1.1.1.1 | | |
| Kas di Kas Daerah | 5.1.1.1.1.1 | 19.182.540.176,66 | 14.428.033.878,33 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.1.1.1.1.2 | 3.575.000,00 | 80.083.700,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.1.1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 5.1.1.1.1.4 | 4.650.490.035,20 | 5.144.094.746,80 |
| Kas Dana BOS | 5.1.1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 5.1.1.1.1.6 | 471.374,00 | 139.665.450,00 |
| Kas Lainnya | 5.1.1.1.1.7 | 0,00 | 11.530.000,00 |
| Setara Kas | 5.1.1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana Desa | 5.1.1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana BHP | 5.1.1.1.1.10 | 180.000,00 | 0,00 |
| Kas Dana BOF Puskesmas | 5.1.1.1.1.11 | 188.264.343,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pajak Daerah | 5.1.1.1.4 | 12.904.022.520,45 | 10.351.691.404,56 |
| Piutang Retribusi Daerah | 5.1.1.1.5 | 6.617.875.947,00 | 5.241.427.815,00 |
| Piutang Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.1.6 | 0,00 | 2.569.480.230,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.1.1.1.7 | 12.324.774.255,81 | 19.557.402.486,82 |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | 5.1.1.1.8 | 17.279.359.000,00 | 3.168.839.340,00 |
| Piutang Transfer Antar Daerah | 5.1.1.1.9 | 5.443.116.876,00 | 4.518.883.017,00 |
| Piutang Lainnya | 5.1.1.1.10 | 2.778.761.797,25 | 56.904.027.841,25 |
| Penyisihan Piutang | 5.1.1.1.11 | (10.650.191.053,45) | (9.686.877.242,40) |
| Beban Dibayar Dimuka | 5.1.1.1.12 | 13.750.000,00 | 13.750.000,00 |
| Persediaan | | 16.713.952.203,87 | 18.200.412.819,30 |
| **Jumlah Aset lancar** | | **79.873.790.031,81** | **121.891.345.897,06** |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.1.1.2 | | |
| Investasi Jangka Non-Permanen | 5.1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | 5.1.1.2.2 | 18.137.504.960,22 | 18.137.504.960,22 |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | | **18.137.504.960,22** | **18.137.504.960,22** |
| ASET TETAP | 5.1.1.3 | | |
| Tanah | 5.1.1.3.1 | 615.761.651.695,00 | 905.255.129.175,00 |
| Peralatan dan Mesin | 5.1.1.3.2 | 382.594.450.345,10 | 958.928.780.783,21 |
| Gedung dan Bangunan | 5.1.1.3.3 | 930.204.861.344,00 | 794.398.376.334,14 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.1.3.4 | 1.344.497.691.827,06 | 1.405.044.802.594,14 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.1.1.3.5 | 88.611.791.818,60 | 87.161.802.504,71 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.1.1.3.6 | 11.409.227.823,50 | 1.778.987.207,00 |
| Akumulasi Penyusutan | 5.1.1.3.7 | (1.354.948.203.103,05) | (1.324.343.527.599,81) |
| **Jumlah Aset Tetap** | | **2.007.756.413.891,09** | **2.023.559.482.948,79** |
| PROPERTI INVESTASI | 5.1.1.4 | | |
| Properti Investasi | 5.1.1.4.1 | 11.370.904.337,55 | 11.370.904.337,55 |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | 5.1.1.4.2 | (655.016.167,10) | (887.174.030,00) |
| **Jumlah Properti Investasi** | | **10.715.888.170,45** | **10.483.730.489,55** |
| DANA CADANGAN | 5.1.1.5 | | |
| Dana Cadangan | 5.1.1.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| **Jumlah Dana Cadangan** | | **0,00** | **0,00** |
| ASET LAINNYA | 5.1.1.6 | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 5.1.1.6.1 | 2.800.555.730,67 | 84.799.694,67 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.1.1.6.2 | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.1.1.6.3 | 2.826.767.466,13 | 1.894.717.187,05 |
| Aset Lain - Lain | 5.1.1.6.4 | 21.803.432.000,52 | 51.045.350.134,00 |
| **Jumlah Aset Lainnya** | | **28.029.755.196,31** | **53.024.655.951,14** |
| **JUMLAH ASET** | | **2.144.267.350.863,53** | **2.227.447.583.835,73** |

| URAIAN | KET/CALK | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| KEWAJIBAN | 5.3.1 | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 5.3.2.1 | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga | 5.3.2.1.2 | 0,00 | 11.510.000,00 |
| Utang Bunga | 5.3.2.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | 5.3.2.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | 5.3.2.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1.5 | 88.792.400,00 | 35.136.301,07 |
| Utang Belanja | 5.3.2.1.6 | 397.882.992,00 | 8.848.781.210,80 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.7 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 397.615.392,00 | 8.895.417.511,87 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 5.3.2.2 | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 5.3.2.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 5.3.2.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 5.3.2.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| Utang kepada Masyarakat | 5.3.2.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 397.615.392,00 | 8.895.417.511,87 |
| EKUITAS | | | |
| EKUITAS | 5.3.3 | | |
| Ekuitas | 5.3.3.1 | 2.145.869.695.471,53 | 2.218.552.098.313,05 |
| JUMLAH EKUITAS | | 2.145.869.695.471,53 | 2.218.552.098.313,05 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 2.146.267.310.863,53 | 2.227.447.515.825,01 |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

WALIKOTA BIMA,

A. RAHMAN



# PEMERINTAH KOTA BIMA

## LAMPIRAN VI :

## LAPORAN ARUS KAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH ..... KOTA .....
NOMOR ( TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD UNTUK PENDAFTARAN DAN HELARIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA .....
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(URAIAN) | KODE AKUN | TAHUN 2024 | TAHUN 2023
---|---|---|---
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
Arus Masuk Kas | 4.0.0.0 | | |
Penerimaan Pajak Daerah | 4.1.0.0.0 | | |
Penerimaan Retribusi Daerah | 4.1.1.1.1 | 11.130.263.580,11 | 13.735.895.681,11
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.1.1.1.2 | 21.138.305.400,00 | 8.724.084.184,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah | 4.1.1.1.3 | 2.922.835.350,00 | 2.340.780.651,00
Penerimaan Dana Perimbangan | 4.1.1.1.4 | 4.158.330.290,38 | 86.755.756.468,67
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) | 4.1.1.1.5 | 895.994.981.817,00 | 933.975.550.858,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewa Yogyakarta | 4.1.1.1.6 | 0,00 | 74.731.315.000,00
Penerimaan Dana Keistimewa | 4.1.1.1.7 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Dana Desa | 4.1.1.1.8 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Dana Insentif Fiskal | 4.1.1.1.9 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Bagi Hasil | 5.1.0.1.10 | 2.784.029.000,00 | 0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan | 5.1.0.1.11 | 89.102.017.210,00 | 54.382.999.000,00
Penerimaan Hibah | 5.1.0.1.12 | 0,00 | 3.651.063.000,00
Penerimaan Dana Darurat | 5.1.0.1.13 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Lain Arus Pendapatan Transfer Antar- Internasi Pemerintah Lainnya Lembaga | 5.1.0.1.14 | 0,00 | 0,00
Arus Masuk Kas | 5.1.0.1.15 | 68.765.335.476,00 | 9.525.776.963,00
Arus Keluar Kas | | 897.995.336.107,38 | 975.989.680.982,78
Pembayaran Pegawai | 5.0.0.0 | | |
Pembayaran Barang dan Jasa | 5.1.1.2.1 | 940.084.345.642,00 | 971.971.723.926,00
Pembayaran Bunga | 5.1.1.2.2 | 230.668.139.771,00 | 267.851.732.468,21
Subsidi | 5.1.1.2.3 | 0,00 | 0,00
Hibah | 5.1.1.2.4 | 0,00 | 0,00
Pembayaran Bantuan Sosial | 5.1.1.2.5 | 43.166.186.230,00 | 37.140.122.221,00
Pembayaran Tak Terduga | 5.1.1.2.6 | 4.175.000.000,00 | 3.481.600.000,00
Pembayaran Dana Darurat | 5.1.1.2.7 | 1.305.846.700,00 | 1.931.733.877,00
Pembayaran Transfer Keuangan | 5.1.1.2.8 | 0,00 | 0,00
Arus Keluar Kas | 5.1.1.2.9 | 0,00 | 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 779.890.860.210,00 | 882.457.457.206,21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | 122.974.427.416,29 | 89.589.499.282,42
Arus Masuk Kas | 5.0.0.0 | | |
Penerimaan Dana Cadangan | 5.5.0.0.1 | | |
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 5.5.0.0.2 | 0,00 | 0,00
Penjualan atas Aset Lainnya | 5.5.0.0.3 | 1.405.377.814,11 | 1.317.756.855,00
Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.5.0.0.4 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Investasi Jangka Panjang | 5.5.0.0.5 | 0,00 | 0,00
Arus Masuk Kas | 5.5.0.0.6 | 0,00 | 0,00
Arus Keluar Kas | | 1.405.377.814,11 | 1.317.756.855,00
Pembentukan Dana Cadangan | 5.5.1.0.0 | | |
Perolehan Tanah | 5.5.1.0.1 | 0,00 | 0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin | 5.5.1.0.2 | 2.282.950.000,00 | 2.094.355.000,00
Perolehan Gedung dan Bangunan | 5.5.1.0.3 | 34.691.921.150,00 | 30.599.618.850,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya | 5.5.1.0.4 | 42.926.291.441,00 | 49.100.940.440,00
Perolehan Aset Lainnya | 5.5.1.0.5 | 47.197.157.108,00 | 54.905.921.026,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.5.1.0.6 | 340.051.000,00 | 1.751.018.775,00
Pengadaan Pembelian Investasi Jangka Panjang | 5.5.1.0.7 | 1.197.186.068,00 | 10.000.000,00
Arus Keluar Kas | 5.5.1.0.8 | 0,00 | 7.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | 5.5.1.0.9 | 0,00 | 0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | 127.851.868.589,00 | 140.676.332.256,00
Arus Masuk Kas | 5.0.0.0 | 122.974.427.416,29 | 89.589.499.282,42
Penerimaan Pinjaman Daerah | 5.6.0.0.1 | | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.6.0.0.1 | 0,00 | 0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya | 5.6.0.0.2 | 0,00 | 9.206.961,84
Arus Masuk Kas | 5.6.0.0.3 | 0,00 | 0,00
Arus Keluar Kas | | 0,00 | 9.206.961,84
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 5.6.0.0.1 | | |
Pembentukan Pinjaman Daerah | 5.6.0.0.1 | 0,00 | 0,00
Arus Keluar Kas | 5.6.0.0.2 | 0,00 | 0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | 0,00 | 0,00
 | | 0,00 | 9.206.961,84

| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
|---|---|---|---|
| [redacted] | | | |
| [redacted] | [redacted] | | |
| [redacted] | [redacted] | | |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | [redacted] | | |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | | | [redacted] |
| [redacted] | | | |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted]


KOTA BIMA
MAJA LABO DAHU